

BAB II

GAMBARAN FENOMENA *XENOFOBIA* DI JERMAN

2.1 Kondisi Sosial Politik Jerman Pascakrisis Migrasi 2015

2.1.1 Kondisi Sosial Politik Jerman Sebelum Krisis Pengungsi 2015

Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Cristian Jopke mengutip bahwa sebelum krisis migrasi pada tahun 2015, Jerman sudah cukup lama dikenal sebagai salah satu tujuan migrasi terbesar di Eropa, dimana dalam era program Gastarbeiter sejak dekade 1960-an, pemerintah Jerman sudah secara aktif merekrut pekerja asing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja negara, yang membuat situasi ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang multikultural dan menjadikan isu integrasi migran menjadi hal penting dalam kebijakan domestik Jerman.⁸¹ Di samping itu, Jopke dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa, sebagai bagian dari Uni Eropa dan ratifikasi Konvensi Jenewa 1951, Jerman memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan pengungsi dan pencari suaka, meski ada kontroversi mengenai integrasi dan identitas nasional, sebelum tahun 2015, isu migrasi belum menjadi isu politik yang polarisasi dalam masyarakat Jerman.⁸² Sebelum terjadinya krisis migrasi tahun 2015, Jerman telah lama menjadi salah satu tujuan utama migrasi di Eropa. Meskipun menerima arus migran secara berkelanjutan, tingkat migrasi pada periode ini masih berada dalam kapasitas yang dapat dikelola oleh

⁸¹ Christian Joppke, *Immigration And The Nation-State: The United States, Germany, And Great Britain*

⁸² *Ibid*, 81

negara, Berdasarkan data BAMF (Federal Office for Migration and Refugees), jumlah permohonan suaka di Jerman pada tahun 2014 tercatat sebanyak 202.834 aplikasi, jauh lebih rendah dibandingkan angka yang muncul setelah krisis migrasi berlangsung. Pada periode yang sama, isu migrasi belum menjadi perhatian utama masyarakat maupun agenda politik nasional yang dominan.⁸³

Dari sisi politik, pengaruh kelompok populis anti-imigrasi juga masih relatif terbatas. Hal ini terlihat dari hasil Pemilu Federal Jerman tahun 2013, di mana dalam data yang dikutip oleh *Bundeskriminalamt* pada tahun 2013 menyebut bahwa partai *Alternative für Deutschland* (AfD) hanya memperoleh 4,7% suara nasional, sehingga gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 5% dan tidak berhasil masuk ke *Bundeskriminalamt*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum krisis migrasi, isu migrasi belum menjadi faktor utama yang menentukan preferensi politik masyarakat Jerman.⁸⁴

Selain itu, tingkat kekerasan terhadap migran dan pengungsi juga masih berada pada level yang lebih rendah dibandingkan periode setelah 2015, Data *Bundeskriminalamt* (BKA) menunjukkan bahwa pada tahun 2014 terdapat sekitar 199 kasus serangan terhadap tempat penampungan pengungsi dan sekitar 1.031 tindak pidana yang berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka, dimana meskipun angka tersebut menunjukkan adanya sentimen anti-imigran di sebagian masyarakat, fenomena tersebut belum dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial maupun keamanan domestik Jerman.⁸⁵

⁸³ Bundesamt Für Migration Und Flüchtlinge (BAMF). (2015). *Migration Report 2014*.

⁸⁴ Bundeswahlleiter. (2013). *Final Results Of The 2013 German Federal Election*.

⁸⁵ Bundeskriminalamt (BKA). (2015). *Politically Motivated Crime Statistics 2014*

Pandangan masyarakat terhadap migrasi juga relatif lebih moderat, dimana berdasarkan survei Eurobarometer tahun 2014, hanya sekitar 8% responden Jerman yang menempatkan migrasi sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi negara. Angka ini menunjukkan bahwa sebelum krisis migrasi, isu migrasi belum menjadi sumber polarisasi sosial yang signifikan dan masih dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat dikelola melalui kebijakan integrasi dan kesejahteraan sosial.⁸⁶ Secara keseluruhan, kondisi sosial-politik Jerman sebelum krisis migrasi 2015 ditandai oleh jumlah pencari suaka yang relatif terkendali, rendahnya dukungan terhadap partai anti-imigrasi, terbatasnya kasus kekerasan terhadap pengungsi, serta belum dominannya isu migrasi dalam perdebatan publik. Oleh karena itu, migrasi pada periode ini lebih banyak dipahami sebagai isu kemanusiaan dan integrasi sosial dibandingkan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau stabilitas sosial negara.

Dalam konteks politik, Ayelet Banai dalam penelitiannya mengutip bahwa kepemimpinan Angela Merkel sebelum 2015 cenderung menekankan pendekatan integratif terhadap isu migrasi, melalui banyak kebijakan yang difokuskan pada peningkatan partisipasi sosial dan ekonomi migran dengan memberikan pendidikan, pelatihan bahasa, dan akses pasar tenaga kerja.⁸⁷ Oleh karena itu, masih dalam kutipan penelitian Ayelet, sebelum terjadi krisis migrasi, kebijakan migrasi Jerman lebih banyak dipahami dalam kerangka ekonomi, kemanusiaan, dan integrasi sosial dibandingkan sebagai isu keamanan nasional.⁸⁸

⁸⁶ European Commission. *Standard Eurobarometer* 82.

⁸⁷ Ayelet Banai & Regina Kreide, "Securitization Of Migration In Germany: The Ambivalences Of Citizenship And Human Rights," *Citizenship Studies* 21, No. 6 (2017).

⁸⁸ *Ibid*, 87

2.1.2 Kondisi Sosial Politik Jerman Tahun 2015-2020

Krisis migrasi tahun 2015, menurut dalam laporan BAMF, menjadi titik balik penting dalam dinamika sosial dan politik Jerman. Pada periode ini, pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselir Angela Merkel menerapkan kebijakan Open Door Policy yang memungkinkan masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke wilayah Jerman, dimana menurut Federal Office for Migration and Refugees (BAMF), lebih dari 890.000 pengungsi memasuki Jerman sepanjang tahun 2015, dengan mayoritas berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan.⁸⁹ Arus migrasi yang besar tersebut mengubah komposisi demografis dalam waktu yang relatif singkat dan mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan.

Meningkatnya jumlah pengungsi, menurut laporan yang dikeluarkan oleh BAMF, memberikan tekanan terhadap berbagai sektor domestik, terutama dalam penyediaan tempat tinggal, layanan kesehatan, pendidikan, dan program integrasi sosial, dimana pada tahun 2016 jumlah permohonan suaka mencapai lebih dari 745.000 aplikasi, sehingga pemerintah harus memperkuat kapasitas institusional dalam mengelola migrasi dan distribusi pengungsi di berbagai wilayah Jerman.⁹⁰

Pada tahap awal krisis, Pew Research Center dalam pemberitaan Washington DC pada tahun 2016 mengatakan bahwa masyarakat Jerman menunjukkan solidaritas yang tinggi terhadap para pengungsi melalui berbagai aktivitas sukarela yang dikenal sebagai Willkommenskultur (Welcome Culture),

⁸⁹ Federal Office For Migration And Refugees (BAMF), *Migration Report 2015* (Nuremberg: BAMF, 2016).

⁹⁰ BAMF, *Migration Report 2016* (Nuremberg: BAMF, 2017).

namun seiring berjalannya waktu muncul pula kekhawatiran mengenai dampak sosial dan ekonomi dari arus migrasi yang besar.⁹¹ Survei Pew Research Center juga menunjukkan bahwa 52% responden di Jerman percaya bahwa masuknya pengungsi dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko terorisme, sementara 31% responden menganggap pengungsi sebagai beban ekonomi bagi negara.⁹² Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan persepsi publik terhadap migrasi yang sebelumnya lebih banyak dipandang sebagai isu kemanusiaan.

Meningkatnya kekhawatiran masyarakat ini *Bundeskriminalamt*, Results of the 2017 German Federal Election dalam pemberitaannya mengatakan bahwa kemudian berkontribusi pada polarisasi sosial dan politik yang semakin tajam. Isu migrasi menjadi salah satu tema utama dalam perdebatan politik domestik dan dimanfaatkan oleh partai populis sayap kanan *Alternative für Deutschland* (AfD). Dukungan elektoral terhadap AfD meningkat secara signifikan dari 4,7% pada Pemilu Federal 2013 menjadi 12,6% pada Pemilu Federal 2017, yang menjadikan partai tersebut sebagai kekuatan politik terbesar ketiga di *Bundestag*.⁹³ Perkembangan ini menunjukkan bahwa migrasi telah bergeser dari isu kemanusiaan menjadi isu politik dan keamanan yang memengaruhi stabilitas domestik Jerman.

Selain itu, meningkatnya sentimen anti-imigran juga tercermin dari bertambahnya kasus kekerasan terhadap migran dan pengungsi, dimana berdasarkan data German Federal Criminal Police Office (BKA), pada tahun 2016

⁹¹ Pew Research Center, *Europeans Fear Wave Of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs* (Washington DC, 2016).

⁹² *Ibid*, 91

⁹³ Bundeswahlleiter, *Results Of The 2017 German Federal Election* (Berlin: Federal Returning Officer, 2017).

tercatat sekitar 3.533 tindak pidana yang berkaitan dengan pengungsi, yang dimana dari jumlah tersebut, sebanyak 2.545 kasus ditujukan langsung kepada pengungsi dalam bentuk intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan tindak pidana kebencian, sementara 988 kasus lainnya berupa serangan terhadap tempat penampungan pengungsi.⁹⁴ Meningkatnya tindakan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa *Xenofobia* berkembang menjadi persoalan sosial yang semakin serius di Jerman.

Dalam konteks tersebut, Beck dalam penelitiannya mengutip jika *Xenofobia* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai masalah sosial, melainkan mulai dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kohesi sosial, integrasi masyarakat multikultural, dan stabilitas domestik, dimana hal tersebut membuat pemerintah Jerman mulai mengembangkan berbagai langkah politik dan institusional untuk merespons perkembangan tersebut, yang kemudian menjadi bagian dari proses Sekuritisasi *Xenofobia* pascakrisis migrasi 2015.⁹⁵

Tabel 2.1 Perbandingan Kumulatif Sebelum Krisis & Pasca Krisis

Parameter Perbandingan	Sebelum Migrasi (2014)	Krisis (2013-2014)	Pasca Migrasi (2015-2020)	Selisih/Tren
Jumlah pengungsi pencari suaka yang masuk ke Jerman	202.834 permohonan suaka (2014)		890.000 pengungsi masuk (2015)	Naik lebih dari 4 kali lipat
Permohonan suaka tahunan	202.834 aplikasi (2014)		745.545 aplikasi (2016)	Naik sekitar 267%
Dukungan terhadap AfD	4,7% suara nasional (pemilu 2013)		12,6% suara nasional (pemilu 2017)	Naik 7,9% AfD masuk <i>Bundeskriminalamt</i>
Tindak pidana	199 kasus (2014)		988 kasus (2016)	Naik hampir 5

⁹⁴ Bundeskriminalamt (BKA), *Criminality In The Context Of Immigration 2016* (Wiesbaden: BKA, 2017).

⁹⁵ Beck, M., "On The Making Of The German 'Refugee Crisis': Securitizing Muslim Immigrants In 2015 And Beyond," *Journal Of Refugee Studies* 34, No. 2 (2021): 1307–1326.

terhadap tempat pengungsi			kali lipat
Tindak pidana terhadap pengungsi	1.031 kasus (2014)	2.545 kasus (2016)	Naik sekitar 147%
Persepsi migrasi sebagai masalah utama negara	8% responden Jerman (2014)	37% responden (2016)	Naik 29 poin presentase
Kebijakan pemerintah	Fokus integrasi dan kebutuhan tenaga kerja	Integrasi + penguatan dan pengawasan	Pergeseran menuju ranah keamanan

Sumber: BAMF (2015; 2016; 2017); *Bundeskriminalamt/BKA* (2015; 2017); Pew Research Center (2016); Eurobarometer (2014; 2016); *Bundeskriminalamt* (2017).

2.2 Meningkatnya Sentimen Anti-Migran dan Populisme Sayap Kanan

Setelah krisis migran 2015, menurut penelitian Wodak peningkatan jumlah pengungsi di Jerman tidak hanya mempengaruhi masalah yang ada di sisi sosial, melainkan juga menyebabkan berkembangnya sentimen anti-migran yang menjadi lebih kuat di kalangan masyarakat Jerman.⁹⁶ Sentimen ini berkembang akibat meningkatnya kekhawatiran dari publik tentang masalah keamanan, ekonomi, dan identitas budaya.

Dari survei yang dilakukan oleh Pew Research Center dapat diketahui bahwa sekitar 52% responden mengaitkan arus pengungsi dengan peningkatan risiko terorisme atau dimensi keamanan, selain itu 31% menganggap pengungsi menjadi beban ekonomi atau dimensi ekonomi. Dan yang terakhir Sebagian besar responden kanan-konservatif juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap identitas nasional dan budaya atau dengan kata lain dimensi budaya.⁹⁷ Hal ini menunjukkan

⁹⁶ Krzyzanowski, M., Triandafyllidou, A., & Wodak, R. (2018). *The Mediatization And Politicization Of The "Refugee Crisis" In Europe*. Journal Of Immigrant & Refugee Studies, 16(1–2), 1–14. <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1353189> Diakses Pada Juni 2026

⁹⁷ Wike, R., Stokes, B., & Simmons, K. (2016). *Europeans Fear Wave Of Refugees Will Mean More Terrorism, Fewer Jobs*. Pew Research

adanya perubahan persepsi publik yang signifikan dibandingkan dengan awal krisis migrasi. Selain itu, meningkatnya sentimen anti-migran juga dapat diamati melalui peningkatan narasi tentang migran di ruang publik. Migran sering kali dikelompokkan sebagai kriminal, teroris, dan bahaya bagi budaya lokal. Angka dari German Federal Criminal Police Office (BKA) menyatakan bahwa masalah keamanan adalah salah satu alasan penting dalam pembentukan sentimen publik tentang migran, meskipun tidak didukung oleh data yang konsisten secara empiris.⁹⁸ Narasi tersebut kemudian dibuat semakin kuat melalui media dan kelompok tertentu.

Kondisi ini juga dimanfaatkan oleh populis sayap kanan untuk menambah basis dukungan politik mereka. Salah satunya adalah partai *Alternative für Deutschland* (AfD). Setelah krisis migrasi, partai ini mengalami kenaikan secara elektoral. Pada tahun 2017, dalam pemilihan umum federal, AfD berhasil mendapatkan sekitar 12,6% suara dan menjadi partai ketiga dengan jumlah pendukung terbanyak di parlemen Jerman (*Bundestag*).⁹⁹ Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi politik mereka yang menekankan isu anti-imigrasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Selain partai politik, gerakan sosial seperti PEGIDA (*Patriotic Europeans Against the Islamization of the West*) juga memainkan peran penting dalam memperkuat sentimen anti-imigran. Gerakan-gerakan ini secara teratur melakukan

Center. <https://www.pewresearch.org/global/2016/07/11/Europeans-Fear-Wave-Of-Refugees-Will-Mean-More-Terrorism-Fewer-Jobs/> Diakses Pada 20 Juni 2026, Pukul 01.20 WIB.

⁹⁸Federal Criminal Police Office (BKA), *Crime Situation Report 2016*, <https://www.bka.de> Diakses Pada 17 April 2026, Pukul 19.25 WIB

⁹⁹Federal Returning Officer (Bundeswahlleiter), *German Federal Election Results 2017*, <https://www.bundeswahlleiter.de> Diakses Pada 17 April 2026, Pukul 19.27 WIB.

protes terhadap kehadiran imigran dan Islam di Jerman. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa *Xenofobia* tidak hanya berkembang pada tingkat individu tetapi juga di institusionalisasikan melalui gerakan sosial dan politik.¹⁰⁰ Terakhir, meningkatnya populisme dari sayap kanan dan sentimen anti-migran ini membantu menciptakan polarisasi dalam masyarakat Jerman atau dengan kata lain yakni sebagian masyarakat menerima mengenai ancaman dan sebagian masih menolak dan tetap teguh dengan narasi anti migran, Seperti terjadi polarisasi masyarakat antara mereka yang menyuarakan kebijakan terbuka terhadap migran dan mereka yang menolak keberadaannya.¹⁰¹ Dengan polarisasi ini, hal-hal ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial di Jerman, tapi juga membentuk konstruksi *Xenofobia* sebagai masalah yang semakin besar dalam masyarakat Jerman ini. Di sinilah *Xenofobia* sudah tidak bisa didefinisikan sebagai masalah sosial saja, tapi juga masalah keamanan.¹⁰²

Dibawah ini merupakan tabel peningkatan anggota sayap kanan karena adanya polarisasi dalam masyarakat Jerman itu sendiri. Dimana dikutip dalam penelitian Marej dalam data *Bundesamt für Verfassungsschutz* (BfV) menyatakan bahwa pada tahun 2015 anggota sayap kanan hanya berjumlah sekitar 22.600 anggota, yang kemudian meningkat sekitar 33.300 pada tahun 2020.¹⁰³

¹⁰⁰Kneuer, M. Et Al. (2025), Citizens' Discourse During Migration Crisis In Germany, <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23745118.2024.2446827> Diakses April 2026

¹⁰¹ Krzyżanowski, M., Triandafyllidou, A., & Wodak, R. (2018). The Mediatization And Politicization Of The "Refugee Crisis" In Europe. *Journal Of Immigrant & Refugee Studies*, 16(1–2), 1–14. <https://doi.org/10.1080/15562948.2017.1353189> Diakses Pada Juni 2026.

¹⁰²Moormann, B. (2019). *(De) Securitization Of Migration In Germany* (Master's Thesis, Charles University). <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/178281> Diakses Pada Juni 2026

¹⁰³Marej, K. (2023). *Ideations Of Social Sustainability? Concepts And Cleavages Of Cohesion In Germany*. *Frontiers In Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1135205>

Tabel 2.2 Jumlah Anggota Sayap Kanan

Tahun	Jumlah Anggota
2015	22.600
2018	24.100
2020	33.300

Sumber: Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), Verfassungsschutzbericht 2015; 2018; 2020 (Berlin: BfV).

2.3 Bentuk Nyata *Xenofobia* di Ruang Publik dan Media

Manifestasi *Xenofobia* di Jerman pasca-krisis migrasi 2015 bukan saja menjadi masalah diskursif, tetapi juga menjadi sebuah kenyataan dalam berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatnya tindakan kekerasan kepada migran dan asrama pengungsi. Data dari German Federal Criminal Police Office (BKA) dalam pemberitaan Deutsche Welle menunjukkan bahwa ada sekitar 3.533 insiden pelaku kejahatan. Dengan rincian 2.545 yakni merupakan tindak pidana, yang meliputi penganiayaan, intimidasi, ancaman, pelecehan, serangan fisik, serta tindak pidana kebencian. Kemudian 988 nya di masukkan ke dalam tindakan kekerasan terhadap tempat pengungsi mereka yang meliputi kamp pengungsi, rumah suaka, tempat penampungan sementara. Kejahatan ini meliputi vandalisme, pembakaran, pelemparan batu, ancaman bom, serta perusakan properti.¹⁰⁴ Angka ini mencerminkan bahwa *Xenofobia* telah berkembang dari sekadar sikap menjadi tindakan yang mengancam keamanan sosial. Selain kekerasan fisik, *Xenofobia* juga dapat muncul dalam bentuk kejahatan yang didasarkan pada motivasi kebencian atau Hate Crime. Seperti yang dilaporkan

¹⁰⁴ Deutsche Welle. (2017, February 26). *Germany Records More Than 3,500 Attacks On Refugees In 2016*.

oleh BKA, Ditulis dalam penelitian Musthaq menyebut bahwa jumlah kasus kejahatan motivasi kebencian terhadap kelompok asing masih cukup tinggi meski beberapa tahun setelah krisis migrasi. Kasus kekerasan motivasi kebencian telah mengalami peningkatan antara tahun 2022 dan 2020 yang dimana dapat dilihat bahwa sentimen *Xenofobia* tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan terus berkembang dalam masyarakat. Dimana pada tahun 2015 terdapat 1.031 serangan terhadap shelter pengungsi, dan pada tahun 2016 sekitar 3.533 itu tadi merupakan puncak krisis migrasi. Jumlah ini mengalami kenaikan signifikan dan penurunan pada tahun 2017, dan turun kembali pada tahun 2020.¹⁰⁵

Tabel 2.3 Data BKA Mengenai Hate Crime

Tahun	Jumlah Serangan
2015	1.031
2016	3.533
2017	950
2018	1.248
2019	1.620
2020	1.092

Sumber: Bundeskriminalamt (BKA), Politisch Motivierte Kriminalität (2015–2020), Bundeskriminalamt des Innern, für Bau und Heimat (BMI), Politisch Motivierte Kriminalität – Bundeskriminalamt Fallzahlen (2015–2020).

Selain angka statistik, isu *Xenofobia* di Jerman juga dapat diamati dalam berbagai kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah. Ini termasuk serangan terhadap pusat pengungsi di Heidenau Sachsen yang dilaporkan oleh BMI yang

¹⁰⁵ Mushtaq, S., Hamid, D., & Sheikh, J. (2021). *Securitisation Of The Refugee Issue In Germany: The Far Right Challenge To Government Policies*. *Malaysian Journal Of International Relations*, 9(1).

terjadi pada tahun 2015 di mana ratusan ekstremis sayap kanan menyerang pusat pengungsi dengan batu dan kembang api yang mengakibatkan beberapa orang terluka.¹⁰⁶ Kasus berikutnya terjadi di Saxony pada tahun 2015, dalam berita Deutche Welle menyebut di mana terjadi bentrokan antara penduduk setempat dan petugas keamanan karena penolakan terhadap kehadiran pengungsi. Kasus ini menjadi salah satu simbol meningkatnya perlawanan penduduk terhadap imigran di Jerman. Serangan itu sendiri bahkan dikualifikasikan sebagai terorisme oleh otoritas Jerman, yang menunjukkan bahwa *Xenofobia* dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan.¹⁰⁷ Insiden *Xenofobia* tidak hanya terjadi di Jerman Timur, tetapi juga di kota-kota lain dalam bentuk serangan terhadap masjid, pidato kebencian publik, dan intimidasi terhadap migran. Statistik yang diberikan oleh BKA menunjukkan bahwa serangan terhadap kamp pengungsi terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara bagian seperti Brandenburg dan Mecklenburg-Western Pomerania.¹⁰⁸

Xenofobia termanifestasi dalam bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap migran di wilayah Brandenburg, khususnya setelah krisis tahun 2015. Misalnya, dalam Deutche Welle menyebut bahwa satu insiden serangan *Xenofobia* dilaporkan terjadi terhadap tempat penampungan pengungsi di beberapa kota kecil seperti Nauen dan Cottbus. Pada tahun 2015, aula olahraga di Nauen yang dimaksudkan untuk menampung pengungsi dibakar oleh kelompok ekstremis sayap kanan, yang ternyata merupakan kelompok kejahatan terorganisir. Selain itu, di Cottbus,

¹⁰⁶ German Federal Ministry Of The Interior (BMI). (2017). *Report On Right-Wing Extremist Violence And Hate Crimes In Germany*. Berlin: BMI.

¹⁰⁷ Deutsche Welle, *Freital Terror Trial: Germany Convicts Far-Right Group* (2018)

¹⁰⁸ Federal Criminal Police Office (BKA), *Politically Motivated Crime Report*

ketegangan antara penduduk setempat dan migran meningkat sedemikian rupa sehingga pemerintah menangguhkan penerimaan pengungsi pada tahun 2018. Insiden-insiden tersebut menunjukkan bahwa *Xenofobia* di Brandenburg tidak hanya mencerminkan sikap sosial tetapi juga berkembang menjadi tindakan kolektif yang mengancam ketertiban umum dan menunjukkan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah mengenai migrasi.¹⁰⁹

Kemudian dalam pemberitaan oleh BBC Indonesia, ada Chemnitz pada tahun 2018 ketika kerusuhan massal terjadi setelah pembunuhan seorang warga negara yang menyebabkan seruan untuk "Jerman untuk orang Jerman" diikuti oleh serangan terhadap warga asing.¹¹⁰ Serangan Hanau yang terjadi pada tahun 2020 dalam pemberitaan oleh Federal Prosecutor General merujuk pada kasus penembakan di sebuah bar oleh kelompok rasis sayap kanan ekstrem yang menewaskan sembilan migran Turki dan Arab.¹¹¹ Selain itu, di Freital Sachsen yang merujuk pada serangan dan ancaman terhadap keluarga pencari suaka yang dilakukan oleh Neo-Nazi di wilayah tersebut meningkat tajam selama periode yang disebutkan di atas.¹¹²

Sementara itu, di Mecklenburg-Western Pomerania, fenomena *Xenofobia* juga terlihat melalui meningkatnya aktivitas kelompok sayap kanan dan serangan terhadap migran. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu benteng partai sayap kanan

¹⁰⁹ Deutsche Welle, *Arson Attack On Refugee Shelter In Nauen* (2015)

¹¹⁰ BBC News Indonesia. (2018, 29 Agustus). *Kerusuhan Chemnitz: Mengapa Ekstrem Kanan Bangkit Di Jerman?* <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45327012> Diakses Pada 19 Juni 2026, Pukul 02.30 WIB.

¹¹¹ Federal Prosecutor General. (2020). *Attack In Hanau*. <https://www.generalbundesanwalt.de> Diakses 19 Juni 2026, Pukul 03.00 WIB.

¹¹² Deutsche Welle. (2018, March 7). *German Court Sentences Freital Far-Right Terror Group*.

populis seperti AfD, yang secara aktif membangun narasi yang menjelekkan migrasi. Kasus intimidasi, ujaran kebencian, dan kekerasan terhadap fasilitas pencari suaka semakin umum terjadi, terutama di daerah pedesaan yang dicirikan oleh tingkat keragaman yang relatif rendah. Menurut laporan dari otoritas keamanan Jerman, wilayah ini memiliki tingkat kejahatan yang relatif tinggi yang didorong oleh motif politik, terutama yang terkait dengan ideologi sayap kanan. Situasi ini menunjukkan bahwa *Xenofobia* di Mecklenburg-Western Pomerania tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial tetapi juga oleh dinamika politik lokal yang mengkonstruksi migran sebagai "ancaman." Contoh ini menunjukkan bahwa *Xenofobia* adalah fenomena yang tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan bersifat nasional.¹¹³

Selain kekerasan langsung, *Xenofobia* juga muncul dalam bentuk praktik diskriminasi sosial yang dilakukan secara harian. Migran seringkali mengalami kendala dalam mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun layanan publik. Laporan yang disampaikan oleh European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) menyebutkan bahwa banyak migran yang tinggal di Jerman mengalami diskriminasi berdasarkan asal etnis atau agamanya, utamanya dalam pasar tenaga kerja dan interaksi sosialnya. Ini menandakan bahwa *Xenofobia* bukan saja muncul dalam bentuk ekstrem, tapi juga dalam praktik sosial yang lebih halus namun sistematis. Massa media dan media digital juga memiliki peran dalam mengonstruksikan narasi *Xenofobia*. Beberapa media biasanya membentuk narasi

¹¹³ U.S. Department Of State. (2022). *2021 Country Reports On Human Rights Practices: Germany*. Bureau Of Democracy, Human Rights, And Labor. <https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/germany/> Diakses Pada 19 Juni 2026, Pukul 05.00 WIB

negatif tentang migran, baik dalam konteks kriminalisasi ataupun penghematan biaya.¹¹⁴ Penelitian oleh Rheindorf dan Vollmer pada tahun 2025 melaporkan bahwa diskursus media di Jerman seringkali meredupkan narasi tentang migrasi sebagai masalah keamanan, yang secara tidak langsung mendorong persepsi publik tentang migran sebagai “yang lain” (the Other).¹¹⁵ Selain itu, media sosial juga menjadi ruang penyebaran ujaran kebencian yang sulit dikontrol, sehingga mempercepat penyebaran sentimen anti-migran.

Di dalam konteks media massal, beberapa koran seperti Bild dan *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (FAZ) bermain peranan penting dalam penempatan narasi tentang masalah migrasi. Penelitian telah menunjukkan bahwa media-media seperti Bild biasanya lebih cenderung untuk mengaitkan masalah migrasi dengan isu kriminalitas dan keamanan. Hal ini pada gilirannya akan memberikan efek negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap migran.¹¹⁶ Dalam analisis konten media, bahkan laporan-laporan tentang masalah migrasi di Jerman biasanya lebih berfokus pada ide seperti terorisme dan kejahatan daripada aspek kemanusiaan atau integrasi.¹¹⁷

Namun, peristiwa-peristiwa tertentu seperti kasus tahun baru Cologne 2015/2016 telah menjadi titik perubahan dalam narasi media mengenai migrasi. Pasca peristiwa tersebut, media Jerman secara signifikan menaikkan laporannya

¹¹⁴ European Union Agency For Fundamental Rights (FRA), *Second European Union Minorities And Discrimination Survey*, <https://fra.europa.eu> Diakses Pada 20 April 2026, Pukul 19.45 WIB.

¹¹⁵ Rheindorf, M., & Vollmer, B. (2026). *Moving Beyond Securitisation And Deservingness: Convergence Between Political And Media Discourses About 'Irregular Migrants' In Germany*. *Discourse & Society*. <https://doi.org/10.1177/09579265251380606> Diakses Pada Juni 2026

¹¹⁶ Chang, A. (2021). *Public Discourse On Migration In Germany*, https://research.library.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1061&context=international_senior Diakses Pada April 2026

¹¹⁷ Van Berkum, M., Niepert, J., & Fengler, S. (2025). *Migration Reporting In Germany*

mengenai migran, utamanya pria dari Timur Tengah dan Afrika Utara, dalam hubungan dengan kekerasan seksual dan kriminalitas.¹¹⁸ Perubahan framing ini tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga memperkuat konstruksi migran sebagai “ancaman sosial”, yang kemudian berkontribusi pada meningkatnya *Xenofobia*.

Sementara itu, media digital dan media sosial juga merupakan alat penting lainnya untuk propogasi *Xenofobia*. Layanan media sosial populer seperti Facebook, Twitter, dan sejumlah forum online menjadi tempat utama di mana ujaran kebencian (Hate Speech) ditujukan kepada migran. Sebuah studi menunjukkan bahwa eksplisitnya peningkatan ujaran kebencian yang ditujukan kepada pengungsi melalui platform media sosial telah melonjak sejak tahun 2015, dengan penyebab utama berupa narasi yang dibuat oleh media mainstream atau politisi.¹¹⁹ Bahkan, dalam beberapa kasus, bagian komentar di media online di Jerman dilarang digunakan akibat tingkat Hate Speech yang tinggi kepada migran.¹²⁰ Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempercepat penyebaran fake news dan disinformasi terkait migran. Informasi yang tidak terverifikasi, seperti tuduhan kriminalitas atau ancaman budaya, dengan cepat menyebar dan memperkuat sentimen *Xenofobia* di masyarakat.¹²¹ Kondisi ini menunjukkan

¹¹⁸ Wigger, I., Yendell, A., & Herbert, D. (2022). *The End Of “Welcome Culture”?*, <https://Journals.Sagepub.Com/Doi/Pdf/10.1177/02673231211012173> Diakses Pada April 2026

¹¹⁹ *Ibid*, 118

¹²⁰ Vollmer, B. & Karakayali, S. (2018). *The Volatility Of The Discourse On Refugees*

¹²¹ Eberl, J.-M., Meltzer, C. E., Heidenreich, T., Herrero-Jiménez, B., Theorin, N., Lind, F., Berganza, R., Boomgaarden, H. G., Schemer, C., & Strömbäck, J. (2018). The European Media Discourse On Immigration And Its Effects: A Literature Review. *Annals Of The International Communication Association*, 42(3), 207–223. <https://Doi.Org/10.1080/23808985.2018.1497452> Diakses Pada Juni 2026.

bahwa *Xenofobia* tidak hanya diproduksi melalui interaksi langsung, tetapi juga melalui konstruksi digital yang memperluas jangkauan dan intensitasnya.

Dengan demikian, Eberl dalam penelitiannya menyatakan bahwa media massa dan digital bukan saja merenungkan realitas sosial tersebut, tapi juga berperan penting dalam membentuk dan melekatkan fenomena *Xenofobia* sebagai fenomena sosial di Jerman, dengan demikian *Xenofobia* di Jerman setelah Krisis migrasi tahun 2015 bisa digambarkan sebagai fenomena multidimensi yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk beragam seperti kekerasan fisik, tindakan terorisme, diskriminasi sosial, hingga pengembangan narasi oleh media. Banyaknya bentuk yang dimiliki oleh *Xenofobia* ini menandakan bahwa *Xenofobia* tersebut sudah merupakan realitas sosial yang lebih luas lagi, sehingga *Xenofobia* ini bukan saja memiliki dampak bagi individu migran, melainkan juga mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.¹²²

2.4 Dampak *Xenofobia* Terhadap Stabilitas Sosial dan Integrasi Migran

Meningkatnya *Xenofobia* di Jerman setelah krisis migrasi 2015 menurut Weber telah berdampak besar pada stabilitas sosial.¹²³ Salah satu dampaknya adalah meningkatnya polarisasi dalam masyarakat Jerman antara kelompok pro-migran dan kelompok yang menentang kehadiran mereka. Polarisasi menurut Bock dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak hanya terbatas pada ranah publik tetapi juga meluas ke politik dan masyarakat, tetapi juga tercermin dalam meningkatnya dukungan terhadap gerakan dan partai anti-imigrasi serta memburuknya hubungan

¹²² *Ibid*, 121

¹²³ Weber, H. (2019). *Attitudes Towards Minorities In Times Of High Immigration: A Panel Study Among Young Adults In Germany*. *European Sociological Review*, 35(2), 239–257. <https://Academic.Oup.Com/Esr/Article/35/2/239/5258083> Diakses Juni 2026

antar kelompok dalam masyarakat.¹²⁴ Kromczyk dalam penelitiannya mengatakan juga bahwa kondisi membuat kohesi sosial menurun, dimana kohesi sosial yaitu tingkat kepercayaan, solidaritas, dan integrasi antaranggota masyarakat yang menjadi fondasi penting stabilitas sosial di Jerman.¹²⁵

Menurut laporan Bertelsmann Stiftung, meningkatnya ketidakpercayaan dalam kehidupan sosial dan fragmentasi komunitas dapat dianggap sebagai konsekuensi dari ketegangan seputar isu migrasi.¹²⁶ *Xenofobia* dalam penelitian Bencek mengatakan juga telah berkontribusi pada peningkatan konflik sosial dan potensi kekerasan. Seperti yang telah disorot sebelumnya, ribuan serangan terhadap migran dan tempat penampungan mereka menunjukkan bahwa sentimen anti-migrasi telah meningkat menjadi tindakan kekerasan nyata yang membahayakan keamanan domestik.¹²⁷ Menurut angka yang dirilis oleh BKA, kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian terhadap orang asing tetap menjadi salah satu kategori utama kejahatan bermotivasi politik di Jerman. Situasi ini menyoroti bahwa *Xenofobia* tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga memengaruhi stabilitas keamanan secara keseluruhan.¹²⁸

Dari perspektif para migran itu sendiri, menurut Scheineder *Xenofobia* bertindak sebagai penghalang signifikan terhadap proses integrasi sosial. Diskriminasi terkait akses ke pekerjaan dimana pekerja non german seringkali

¹²⁴ Bock, J. J. (2018). *State Failure, Polarisation, And Minority Engagement In Germany's Refugee Crisis*. International Journal Of Politics, Culture, And Society, 31(3), 289–307.

¹²⁵ Kromczyk, M., Khattab, N., & Abbas, T. (2021). *The Limits Of Tolerance: Before And After Brexit And The German Refugee Crisis*. Ethnic And Racial Studies, 44(15), 2724–2744.

¹²⁶ Federal Office For Migration And Refugees (BAMF), *Migration Report 2015*

¹²⁷ Bencek, D., & Strasheim, J. (2016). *Refugees Welcome? A Dataset On Anti-Refugee Violence In Germany*. Research & Politics, 3(4).

¹²⁸ Politisch Motivierte Kriminalität Im Jahr 2022 – Bundesweite Fallzahlen.

ditolak, pendidikan, dan layanan publik mengakibatkan marginalisasi migran dalam interaksi sosial sehari-hari mereka.¹²⁹ Sebuah laporan oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pekerja migran di Jerman cenderung lebih rendah daripada penduduk lokal karena diskriminasi dan stigma sosial.¹³⁰ Hambatan ini tidak hanya merugikan migran, tetapi juga menghambat upaya negara dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari keberadaan mereka.

Selain itu, dikutip dalam International Affairs menurut Pippa Noris *Xenofobia* juga dapat berpengaruh pada legitimasi negara dalam mengelola berbagai perbedaan sosial. Jika negara gagal dalam mengontrol meningkatnya intoleransi dan tindak kekerasan, maka bisa jadi legitimasi negara akan berkurang. Ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik, khususnya dengan semakin banyaknya pendukung gerakan populis yang menggunakan *Xenofobia* sebagai alat politik mereka. Dengan demikian, *Xenofobia* tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas politik dan legitimasi negara.¹³¹

Di sini, Wodak mengatakan dalam penelitiannya bahwa *Xenofobia* juga tidak dapat lagi dilihat sebagai sikap atau pandangan masyarakat saja, namun fenomena *Xenofobia* mulai mengancam kestabilan dan keselamatan internal

¹²⁹ Schneider, J., Yemane, R., & Weinmann, M. (2018). *Discrimination In The Labour Market Of Germany: A Field Experiment On The Effect Of Name And Ethnic Origin*.

¹³⁰ OECD, *Finding Their Way: Labour Market Integration Of Refugees In Germany* (2017), <https://www.oecd.org> Diakses Pada 21 April 2026, Pukul 19.57 WIB.

¹³¹ Inglehart, R., & Norris, P. (2019). *Cultural Backlash: Trump, Brexit, And Authoritarian Populism*. Cambridge University Press.

masyarakat.¹³² Pada akhirnya, Fassin dalam penelitiannya mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat negara mulai merespons fenomena *Xenofobia* dengan pendekatan Sekuritisasi, dengan menginterpretasikan *Xenofobia* sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial, maka negara diberikan wewenang untuk mengambil kebijakan tindakan yang lebih kuat berupa regulasi, monitoring, hingga intervensi di area publik.¹³³ Sehingga, pendekatan Sekuritisasi dapat dipahami sebagai upaya negara dalam menahan dan mengurangi dampak dari *Xenofobia* tersebut demi menjaga keharmonisan dan kestabilan nasional.¹³⁴ Sebagai kesimpulannya, penelitian ini yang dikonstruksikan sebagai ancaman bukanlah migran, melainkan meningkatnya *Xenofobia* terhadap migran yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di Jerman.

2.5 Upaya Awal Pemerintah Dalam Menangani *Xenofobia* Melalui Open Door Policy

Kebijakan yang diambil sebagai tanggapan awal terhadap krisis migrasi pada tahun 2015 adalah kebijakan Open Door Policy dibawah kepemimpinan Angela Merkel dengan tujuan pembukaan jalan bagi para pengungsi dalam jumlah besar tersebut. Kebijakan ini menurut penelitian Crawley, bisa dilihat dari tindakan pemerintahan Jerman yang memutuskan untuk tidak menutup perbatasan dan memberikan akses perlindungan kepada puluhan ribu pengungsi yang masuk ke

¹³² Wodak, R. (2015). *The Politics Of Fear: What Right-Wing Populist Discourses Mean*. SAGE.

¹³³ Fassin, D. (2016). *Humanitarian Reason: A Moral History Of The Present*. University Of California Press.

¹³⁴ Buzan, B., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework For Analysis*. Lynne Rienner.

dalam negeri Jerman.¹³⁵ Selama tahun 2015 menurut Federal Office diketahui sebanyak 890.000 pengungsi memasuki Jerman, Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Jerman tersebut cukup signifikan.¹³⁶ Meskipun demikian, dalam jurnal politik karya Helbing yang dibuka melalui Cambridge University Press mengatakan kebijakan ini terutama dipengaruhi oleh aspek kemanusiaan, namun ada juga pertimbangan lainnya dari sisi sosial dan politik. Namun, kebijakan Open Door Policy pada tahap awal lebih merupakan respon terhadap krisis migrasi itu sendiri, bukan secara langsung ditujukan untuk mengatasi *Xenofobia* yang muncul kemudian.¹³⁷

Dengan Open Door Policy, Benedikter menyatakan bahwa pemerintah berusaha menyajikan narasi bahwa migrasi adalah fenomena yang bisa dikendalikan bersamasama, bukan tantangan yang harus ditolak. Ini dijelaskan melalui pernyataan Kanselir Angela Merkel “Wir Schaffen Das” yang muncul pada tahun 2015, tepatnya pada 30 Agustus 2015, dalam konteks krisis pengungsi Eropa European Refugee/Migration Crisis yang memuncak pada 2015.¹³⁸ yang menunjukkan usaha pemerintah untuk mempersiapkan persepsi publik sehingga lebih menerima kehadiran migran di Jerman.

Pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk membuat kebijakan integrasi dalam rangka merespons peningkatan migran tersebut. BMI dalam

¹³⁵ Crawley, H., Duvell, F., Jones, K., McMahon, S., & Sigona, N. (2018). *Unpacking A Rapidly Changing Scenario: Migration Policy Responses To The “Refugee Crisis” In Europe*. COMPAS, University Of Oxford.

¹³⁶ Federal Office For Migration And Refugees (BAMF), *Migration Report 2015*

¹³⁷ Helbling, M., & Kalkum, D. (2018). *Migration Policy And The Refugee Crisis In Germany: Between Humanitarianism And Political Backlash*. Journal Of European Public Policy.

¹³⁸ Benedikter, R., & Karolewski, I. P. (2016). *Germany And The Refugee Crisis*. Working Paper.

pemberitaanya menyatakan bahwa salah satu kebijakan utamanya adalah *Integrationsgesetz* 2016 yang melibatkan penyelenggaraan kursus bahasa, pelatihan kerja, hingga integrasi pengungsi ke pasar tenaga kerja. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya berfokus dengan masalah penerimaan saja, tetapi juga mengelola dampak sosial, seperti *Xenofobia*.¹³⁹

Namun begitu, implementasi dari Open Door Policy menurut jurnal mahasiswa Larasati et al, juga dihadapkan pada berbagai macam kendala, salah satunya adalah semakin tingginya tingkat resistensi dari kalangan masyarakat tersebut, dengan adanya kenaikan angka migran, semakin tingginya juga sentimen antipati terhadap migran dan *Xenofobia*, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa tindakan kekerasan, diskriminasi, serta peningkatan pergerakan populisme dari kalangan sayap kanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan awal pemerintah belum sepenuhnya mampu mereduksi ketegangan sosial yang muncul akibat krisis migrasi.¹⁴⁰ Pada konteks tersebut, Wicaksono mengatakan bahwa Policy Open Door bisa dipahami sebagai tindakan pertama yang dilakukan oleh negara untuk merespons krisis migrasi dan konsekuensinya, namun dengan makin berkembangnya fenomena *Xenofobia* sebagai sesuatu yang kompleks dan potensial mengganggu stabilitas sosial, negara bukan lagi hanya bisa melakukan tindakan yang biasa dalam kebijakan, diperlukan pendekatan lain yang lebih strategis, yakni dengan menggunakan teknik Sekuritisasi, dalam hal ini *Xenofobia* diposisikan sebagai ancaman bagi stabilitas sosial. Sehingga, disertai dengan

¹³⁹ Bundesministerium Des Innern (BMI). (2016). *Integration Act (Integrationsgesetz)*.

¹⁴⁰ Larasati, V. L., De Fretes, C. H. J., & Wibisono, I. W. (2025). *Dinamika Open Door Policy Terhadap Penduduk Lokal Dan Pengungsi Suriah Di Turki 2019–2024*. Jurnal Indonesia: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP), 5(6).

meningkatnya *Xenofobia* sebagai konsekuensi dari krisis migrasi tersebut, negara pun melakukan pendekatan yang sudah mulai beralih dari kebijakan responsif terhadap krisis migrasi menjadi upaya Sekuritisasi terhadap *Xenofobia* sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.¹⁴¹



¹⁴¹ Wicaksono, E. R. (2018). *Kebijakan Angela Merkel Dalam Mengatasi Krisis Pengungsi Di Eropa Tahun 2015*. Universitas Airlangga.